

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, termasuk dalam cara mereka berinteraksi, bekerja, dan melakukan transaksi ekonomi. Dalam era digital saat ini, kemampuan untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan informasi digital menjadi kebutuhan dasar bagi setiap individu, termasuk pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Konsep ini dikenal sebagai literasi digital.

Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul “*Digital Literacy*” tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang luas yang diakses melalui komputer.¹ Sejak diperkenalkannya internet, dunia telah mengalami transformasi besar dalam cara orang berinteraksi, berkomunikasi, dan melakukan transaksi. Dengan semakin banyaknya akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi, masyarakat dituntut untuk memiliki kemampuan literasi digital yang memadai.

Literasi digital merupakan suatu bentuk keterampilan dalam mendapatkan, memahami serta menggunakan informasi yang berasal dari sumber dalam bentuk digital.² Literasi digital menjadi salah satu keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Namun literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif dan aman. Tanpa literasi digital yang baik,

¹ Ginting, R. V. B., Arindani, D., Lubis, C. M. W., & Shella, A. P. (2021). Literasi digital sebagai wujud pemberdayaan masyarakat di era globalisasi. *Jurnal Pasopati*, 3(2)

² Suminar, L., Maulida, N., & Rachman, I. F. (2024). Strategi Peningkatan Kualitas Literasi Digital Pada Masyarakat. *Jurnal Bima: Pusat Publikasi Ilmu Pendidikan bahasa dan Sastra*, 2(2), 200-209.

individu dapat terjebak dalam kesenjangan digital, di mana mereka tidak dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh teknologi.

Di Indonesia, tantangan literasi digital masih cukup besar. Berdasarkan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) tahun 2024, tingkat literasi digital masyarakat masih berada di angka 43,34 dari skala 100.³ Ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum sepenuhnya menguasai keterampilan digital, termasuk dalam mengakses dan memanfaatkan layanan transaksi digital. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan dalam pemerataan literasi digital yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam kehidupan digital.

Dalam era digitalisasi, perkembangan gaya hidup masyarakat saat ini menunjukkan adanya ketergantungan yang tinggi terhadap teknologi, khususnya penggunaan ponsel pintar dalam aktivitas sehari-hari. Hampir setiap aspek kehidupan kini terhubung dengan perangkat digital, mulai dari komunikasi, informasi, hingga pembayaran digital. Kehadiran smartphone telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam berbelanja dan melakukan pembayaran, di mana tuntutan untuk serba cepat, praktis, dan efisien membuat metode pembayaran digital semakin diminati.

Pembayaran digital yang awalnya merupakan sebuah inovasi, kini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Munculnya berbagai platform pembayaran digital telah mempermudah dan mempercepat transaksi. Faktor-faktor seperti kemudahan penggunaan, keamanan yang lebih baik, dan berbagai fitur menarik telah mendorong masyarakat untuk beralih dari pembayaran tunai ke pembayaran nontunai. Secara lokal maupun global, penggunaan teknologi modern sebagai alat pembayaran nontunai meningkat pesat, dan beberapa inovasi telah dihadirkan untuk menjadikan penggunaannya lebih efisien, aman, cepat dan mudah.

Salah satu inovasi yang hadir sebagai bagian dari perkembangan ini adalah *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS). QRIS adalah

³ Mediana, "Masyarakat Indonesia Belum Fasih Mengadopsi Teknologi Digital kendati Skor Digital Naik." <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/09/10/skor-indeks-masyarakat-digital-indonesia-tahun-2024-mencapai-4334>, Kompas, diakses pada 15 Desember 2024.

standar *QR Code* pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI). Dengan QRIS, pengguna dapat melakukan pembayaran dengan mudah hanya dengan memindai kode QR menggunakan *smartphone*, tanpa perlu membawa uang tunai atau kartu kredit.⁴

Hal ini selaras dengan perkembangan gaya hidup masyarakat yang saat ini mulai beralih dari metode pembayaran tunai ke nontunai (*cashless*). Salah satu alasan utama di balik peralihan ini adalah kemudahan yang ditawarkan oleh sistem *cashless*. Di tengah kesibukan sehari-hari banyak masyarakat menyadari bahwa membawa uang tunai tidak lagi praktis. Tanpa perlu repot membawa uang tunai, masyarakat dapat melakukan pembelian dengan cepat dan efisien. Dalam kehidupan yang serba cepat, kemampuan untuk menyelesaikan transaksi dalam hitungan detik menjadi daya tarik tersendiri. Dengan menggunakan metode pembayaran QRIS mereka dapat melakukan transaksi dengan cepat dan mudah hanya dengan memindai kode QR menggunakan ponsel pintar mereka.

Namun, kemajuan teknologi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan kesiapan masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Sebagai sektor yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia, UMKM diharapkan mampu mengadopsi teknologi digital untuk meningkatkan daya saing. Namun kenyataannya, banyak pelaku UMKM yang belum memahami manfaat QRIS, bahkan enggan menggunakannya karena keterbatasan pengetahuan dan keterampilan digital. Dalam pendidikan masyarakat, kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan proses pembelajaran yang mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan keterampilan dalam mengelola teknologi.

Secara tidak langsung, kondisi tersebut membuat semua sektor usaha dituntut untuk menggunakan metode QRIS tidak terkecuali UMKM (Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah) yang memainkan peranan penting dalam menopang ekonomi di Indonesia. Kontribusi mereka terhadap

⁴ “Apa itu QRIS?” Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. [<https://www.aspi-indonesia.or.id/standar-dan-layanan/qr/s/>]. (Diakses pada 2 Desember 2024)

Produk Domestik Bruto (PDB) dan penyediaan lapangan kerja sangat besar. Pada tahun 2023, tercatat sekitar 66 juta pelaku UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, yang setara dengan Rp9.580 triliun. Selain itu, UMKM menyerap sekitar 96,9% tenaga kerja nasional, menjadikannya sektor utama dalam penciptaan lapangan kerja.⁵

Meski perannya begitu besar bagi perekonomian Indonesia, pelaku usaha di sektor ini belum semua siap untuk mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam hal digitalisasi transaksi. Masih banyak pelaku UMKM yang merasa asing atau bahkan takut untuk mencoba metode pembayaran non tunai seperti QRIS. Mereka cenderung mempertahankan metode konvensional karena merasa lebih aman dan familiar, bahkan masih terdapat UMKM yang belum mengetahui bahwa metode pembayaran QRIS dapat bermanfaat bagi perkembangan usaha mereka. Tidak semua pelaku UMKM memiliki pemahaman yang cukup tentang teknologi dan cara penggunaannya, seperti pelaku UMKM di RW 014 Kelurahan Cipinang Muara.

Sebagai gambaran dilapangan, RW 014 Kelurahan Cipinang Muara merupakan wilayah dengan lokasi yang strategis, di mana banyak pelaku UMKM menjalankan usahanya di sepanjang jalan, terutama di area jalan utama yang ramai dilalui kendaraan dari berbagai daerah. Aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah ini terbilang hidup dan potensial, mengingat tingginya mobilitas serta lalu lintas konsumen yang melintasi kawasan tersebut.

Di tengah perkembangan era digital, masyarakat sebagai konsumen sudah mulai banyak beralih ke sistem pembayaran digital, termasuk menggunakan QRIS sebagai metode transaksi yang lebih praktis dan cepat. Namun, kondisi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM di RW 014, karena masih banyak di antara mereka yang belum menggunakan QRIS dalam praktik usahanya. Padahal, jika melihat potensi

⁵ “UMKM Indonesia.” Kadin Indonesia, [<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia>]. (Diakses pada 23 Februari 2025).

lokasi dan tingginya permintaan dari konsumen yang sudah akrab dengan transaksi digital, penggunaan QRIS oleh UMKM setempat dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing usaha mereka.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis melalui wawancara awal dengan pelaku UMKM di RW 014 Kelurahan Cipinang Muara, diketahui bahwa beberapa pelaku usaha mengaku belum memahami cara kerja QRIS secara menyeluruh, bahkan ada yang menilai bahwa proses pendaftarannya terlalu rumit sehingga lebih memilih menggunakan uang tunai yang dianggap lebih praktis. Ada pula yang merasa lebih nyaman dengan sistem pembayaran tunai karena sudah terbiasa dan tidak memerlukan perangkat digital. Di sisi lain, sebagian pelaku UMKM sudah menggunakan QRIS dalam kegiatan usahanya, dengan alasan bahwa QRIS memberikan kemudahan dalam transaksi, terutama karena cepat dan tidak perlu menyediakan uang kembalian.

Dari total 35 UMKM yang menjadi subjek observasi, hanya 10 UMKM yang telah menggunakan QRIS dalam transaksi sehari-hari. Sementara itu, sebanyak 25 UMKM lainnya masih mengandalkan sistem pembayaran konvensional seperti tunai. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman literasi digital pada UMKM RW 014 belum merata, sekaligus menjadi alasan pentingnya dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman dan penerapan QRIS di kalangan pelaku UMKM.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut perihal kasus yang terjadi dengan judul **“Pemahaman Literasi Digital mengenai Metode Pembayaran *Quick Response Code Indoensian Standard* (QRIS) pada Pelaku UMKM RW 014 Kelurahan Cipinang Muara”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan fokus penelitian adalah bagaimana pemahaman literasi digital mengenai metode pembayaran QRIS pada pelaku UMKM RW 014 Kelurahan Cipinang Muara.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pemahaman literasi digital mengenai metode pembayaran QRIS pada pelaku UMKM RW 014 Kelurahan Cipinang Muara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Sebagai bahan informatif yang dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan mengenai literasi digital dalam metode pembayaran QRIS di kalangan UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi UMKM

Penelitian ini dapat memberikan gambaran dan pemahaman kepada pelaku UMKM mengenai pentingnya literasi digital dalam mendukung efisiensi usaha mereka. Diharapkan hasil penelitian ini mendorong pelaku UMKM untuk lebih terbuka terhadap pemanfaatan QRIS sebagai metode pembayaran yang aman, cepat, dan sesuai dengan perubahan konsumen masa kini.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk mendukung pengembangan pembayaran digital di kalangan UMKM serta merancang program pelatihan atau sosialisasi yang lebih efektif bagi UMKM.

c. Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan dalam melakukan penelitian, khususnya dalam mengumpulkan data, menganalisis fenomena sosial, serta memahami dinamika UMKM dalam era digital.

d. Bagi Pembaca

Bagi pembaca, penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai pemahaman literasi digital, faktor pendorong dan penghambat penerapan QRIS pada pelaku UMKM. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

E. Pembatasan Penelitian

Pembatasan penelitian digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan atau pelebaran pokok bahasan agar penelitian lebih terarah dan mempermudah pembahasan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Adapun Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup atau cakupan penelitian hanya mencakup mengenai pemahaman literasi digital dalam penerapan metode pembayaran QRIS pada UMKM.
2. Subyek penelitian juga dibatasi yaitu pelaku Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) RW 014 Kelurahan Cipinang Muara.